



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA PANSUS**

**RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**

- Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa persidangan : IV  
Rapat ke : 1  
Jenis rapat : Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Sifat Rapat : Tertutup  
Hari, tanggal : Kamis, 8 April 2021  
Waktu : 10.00 s.d. 14.05 WIB  
Tempat : Ruang Pimpinan Pansus B, Gedung Nusantara II lantai 3  
Acara : 1. Penjelasan Pemerintah mengenai RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.  
2. Pandangan Fraksi-fraksi mengenai RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.  
3. Pengesahan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Ketua Rapat : Komarudin Watubun, S.H., M.H./Ketua Pansus  
Sekretaris Rapat : Endah Sri Lestari, S.H., M.Si/Kabag. Set. Pansus  
Hadir : 1. Hadir 23 anggota dari 30 orang anggota Pansus.  
- 19 hadir fisik  
- 4 hadir virtual  
2. Pemerintah:  
a. Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya.  
b. Menteri Keuangan (diwakili oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti)  
c. Menteri hukum dan HAM ( diwakili oleh Dirjen PP Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.)

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di pimpin oleh Ketua Pansus Komarudin Watubun, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka pada pukul 10.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

3. Pandangan Fraksi disampaikan oleh:
  - a. Fraksi PDIP dengan juru bicara My Esti Wijayati. (A-203).
  - b. Fraksi Golkar dengan juru bicara Trifena M. Tinal, BSc (A-348)
  - c. Fraksi Gerindra Juru bicara Habiburokhman, S.H., M.H. (A-77)
  - d. Fraksi Nasdem dengan Juru bicara Sulaeman Hamzah. (A-406)
  - e. Fraksi PKB dengan Juru Bicara M.F. Nurhuda Yusro. (A-15)
  - f. Fraksi PD dengan juru bicara Willem Wandik. (A-575)
  - g. Fraksi PKS dengan juru bicara Teddy Setiadi, S.I.Kom. (A-428)
  - h. Fraksi Partai PAN dengan juru bicara Drs. H. Guspari Gaus, M.Si. (A-484)
  - i. Fraksi PPP dengan juru bicara Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. (A-462)

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Pansus menerima Penjelasan Pemerintah mengenai RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana terlampir.
2. Pansus menerima masukan dari Menteri Keuangan terkait dengan siklus pembahasan RAPBN Tahun 2022 (yang diwakili oleh Dirjen Perimbangan Keuangan) bahwa batas akhir pembahasan RUU ini tidak melebihi pertengahan awal bulan Juli 2021 ( minggu pertama bulan Juli 2021).
3. Fraksi-fraksi menerima dan menyetujui untuk melanjutkan pembahasan mengenai RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pansus dan Pemerintah menyetujui pengesahan rancangan draf Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan sebagai Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dengan catatan beberapa perubahan sesuai dengan masukan dari anggota Pansus dan Pemerintah.
5. Pimpinan Pansus akan menyusun kembali Jadwal Acara kegiatan rapat Pansus sesuai dengan masukan dari anggota Pansus dan Pemerintah dimaksud.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.05 WIB.

KETUA PANSUS

  
KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.

A. 263